

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP LAPORAN KEUANGA
PEMERINTAH DAERAH****Studi Interpretif Pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan****Abdullah Saifuddin dan Masgul Abdullah**

Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi, STMIK Tidore Mandiri

Email: oeyhahs@gmail.com

(Diterima: 08 Februari 2022; direvisi: 21 Maret 2022; dipublikasikan: 1 April 2022)

©2022 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada masa pandemi Covid-19 dan mengeksplorasi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tidore Kepulauan daerah pada masa pandemi Covid 19 dan. Informan Penelitian adalah pejabat pemerintahan yang terlibat langsung dalam penanganan covid-19 dan pejabat pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah interaksi simbolik dengan memformulasikan penelitian pada I dan Me. I dan Me digunakan untuk mendalami diri manusia untuk mendapatkan makna dibalik sesuatu yang diyakininya. tentang pengelolaan anggaran dimasa covid-19.

Hasil Penelitian ditemukan bahwa, Ikhtisar pencapaian target keuangan tahun 2020 adanya target yang tidak tercapai dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 khususnya penerimaan PAD. Implementasi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas laporan keuangan hanya dimaknai sebagai simbol Aturan covid-19. Dan tidak didefinisikan pada konteks yang lebih luas. Dari sisi I Simbolik interaksi yang diperlihatkan oleh pengambil kebijakan pada ruang-ruang dimana mereka berinteraksi selalu membawa simbol aturan covid-19. Laporan keuangan tentang ekonomis, efisien dan efektif, hanyalah undang-undang covid-19 semata dan tidak lebih dari itu. Dari sisi Me interaksi simbolik pemerintah kota Tidore Kepulauan lebih mengedepankan pemenuhan anggaran untuk kepentingan yang mendesak yaitu dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Keywords: *laporan keuangan, covid-19, ekonomis, efektivitas, efisiensi*

Abstract: *This study aims to analyze the financial statements of the Tidore Islands City Government during the Covid-19 pandemic and explore the management of the regional Tidore Islands government budget during the Covid 19 pandemic and. Research informants are government officials who are directly involved in handling Covid-19 and management officials. regional finance. The method used is symbolic interaction by formulating research on I and Me. I and Me are used to explore human beings to get the meaning behind something they believe in. regarding budget management during the Covid-19 period.*

The results of the study found that, in an overview of the achievement of financial targets in 2020, there were targets that were not achieved due to the impact of the COVID-19 pandemic, especially PAD receipts. Economic implementation, efficiency, and effectiveness of financial reports are only interpreted as symbols of the Covid-19 rules. And not defined in a wider context. From the I side, the symbolic interactions shown by policy makers in the spaces where they interact always carry symbols of the Covid-19 rules. Financial reports on economic, efficient and effective, are just the covid-19 law and nothing more. From the Me side, the symbolic interaction of the Tidore Islands city government prioritizes budget fulfillment for urgent interests, namely by prioritizing the interests of the community during the Covid-19 pandemic

Kata kunci: *laporan keuangan, covid-19, ekonomis, efektivitas, efisiensi*

PENDAHULUAN

Sejak Negara Cina me-*lockdown* kota Wuhan sebagai pusat pandemi covid-19, beberapa bulan setelahnya dunia seakan tak berdaya menghadapi keganasan wabah tersebut yang terus menjangkiti ke seluruh belahan dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, termasuk Indonesia. Tidak hanya merosotnya tingkat kesehatan masyarakat, akan tetapi telah merenggut seluruh sendi-sendi kehidupan manusia sehingga diperlukan upaya adaptif dalam penganggulangnya, meski di awal-awal kemunculannya di Indonesia terkesan kurang merespon.

Secara umum dalam beberapa kasus covid-19 di daerah, mempengaruhi perubahan struktur APBD belum tampak mengalami peningkatan dari sisi belanja, kalaulah ada hanya pada daerah-daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mengatasi wabah covid-19. Kasus lainnya adalah pada sikap otoritas anggaran di daerah yang memberi pemotongan prosentase yang sama pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penanganan covid-19, yang tidak didasarkan pada lembaga strategis seperti dinas kesehatan, dinas tanaman pangan, dan dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja misalnya, semestinya tidak dibebankan dengan melakukan pemotongan, justru keberadaannya di tengah pandemi seperti ini perlu diberi sejumlah alokasi belanja yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat.

Persoalan-persoalan tersebut, mengindikasikan bahwa pandemi covid-19 menjadi pengganggu yang serius terhadap alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Gangguan ini nampak jelas didepan mata penulis, dimana proyek-proyek pemerintah yang anggarannya telah ditetapkan, harus dihentikan sementara waktu dan dialokasikan untuk membiayai aktivitas yang berkaitan dengan penanganan covid-19. Tentunya pengalihan anggaran tersebut memberikan imbas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Yang mana laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan yang telah dilakukan pemerintah daerah (*accounting man*). Sehingga dengan LKPD akan terlihat bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi sejauhmana fenomena pandemi covid-19 berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan penelitian yaitu menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada masa pandemi Covid-19 dan mengeksplorasi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tidore Kepulauan daerah pada masa pandemi Covid-19.

METODE

Metode penelitian menggunakan metode interaksi simbolik. Metode interaksi simbolik memformulasikan penelitian dengan formula I dan Me. I dan Me digunakan untuk mendalami diri manusia untuk mendapatkan makna dibalik sesuatu yang diyakininya. Metode I yaitu menganalisis diri para pelaku anggaran covid-19, dari sisi kreatifitas, spontanitas, impulsif, dan diri yang didalamnya terkandung sifat “hewani” atau diri yang “Ego”. Analisis I disebut juga sisi terdalam dari manusia yang

hendak diteliti. Selanjutnya, Metode Me yaitu menganalisis diri pelaku anggaran covid-19, dari sisi tampilan (*cover*) dimana. diri yang berkehendak secara sosial, dan diri yang didalamnya terkandung sifat manipulasi manusia. Analisis Me disebut juga sisi permukaan manusia.

Metode interaksi simbolik dilakukan dengan mengumpulkan data melalui:

1. Studi kepustakaan

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu melalui data-data tertulis yang diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen arsip serta laporan-laporan resmi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan terkait seperti Badan Keuangan Pemerintah daerah, Lembaga Kementerian dan instansi lain yang relevan. Data dan informasi juga didapat dengan menelaah buku-buku dan literatur lain yang digunakan sebagai referensi.

2. Observasi dan dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan yang terarah, terencana dan sistematis. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengamati masalah dan fenomena di pemerintah kota, kemudian memahami fenomena/masalah tersebut dan kemudian mencari jawaban melalui fakta dan kejadian di lapangan yang merupakan objek penelitian. Hasil yang diperoleh kemudian dipotret, dicatat maupun direkam guna untuk pertimbangan analisis.

3. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Peneliti menggunakan teknik wawancara “snowball” yakni penentuan subjek dan informan berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Oleh karena itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci. Namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dianalisis berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasar kajian dampak pandemi covid-19 terhadap laporan keuangan pemerintah kota Tidore Kepulauan, diuraikan sebagai berikut :

- a. Program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada perubahan APBD tahun 2020 dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan Realisasi anggaran pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk pendapatan daerah realisasinya 906.027.787.630 sedangkan jumlah yang dianggarkan 874.080.209.104 dengan selisih 31.947.578.526 persentase 3.65 %. Dan Belanja daerah realisasinya 820.373.123.981 sedangkan jumlah yang dianggarkan 892.006.423.653 dengan selisih - 71.633.299.672 persentase (8.03%). Dengan demikian pada pos pendapatan daerah terjadi perubahan

pendapatan yang relatif kecil ditunjukkan dengan persentase hanya 3.65 %. Sedangkan pada Belanja daerah terjadi perubahan penurunan yang signifikan dengan ditunjukkan persentase min 8.03 %.

b. Pada catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi Covid-19 dapat diungkapkan secara memadai, diantaranya:

1. Pada bagian kebijakan fiskal keuangan daerah dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan anggaran yang terdampak Pandemi Covid-19.
2. Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan. Ikhtisar pencapaian target keuangan tahun 2020 telah dijelaskan adanya target yang tidak tercapai dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 khususnya penerimaan PAD.
3. Kebijakan akuntansi perlu menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.

Untuk tahun 2020 seluruh transaksi yang terkait dengan penanganan pandemi covid-19 yang bersumber dari belanja tak terduga dilaporkan dan dijelaskan dalam pos Belanja Tak Terduga untuk LRA dan Pos Beban luar biasa untuk LO, dampak dari pandemi covid-19 dijelaskan dalam ikhtisar pencapaian target keuangan.

4. Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau *refocussing* anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.

Makna Kebijakan Ekonomis Anggaran

Penjelasan Informan pada bidang kesehatan, menjadi ukuran bahwa anggaran kesehatan covid-19 secara masukan (*input*) lebih cenderung pada mengikuti aturan semata, bahwa anggaran yang dialokasikan mengacu pada aturan covid-19 dengan mengenyampingkan aturan lainnya, misalnya penerapan aturan anggaran berbasis kinerja jika melakukan *input* (anggaran) untuk mendapatkan kinerja terbaik. Sedangkan pada bidang ekonomi pemahaman bahwa aturan covid-19 harus diutamakan dan mengenyampingkan aturan anggaran berbasis kinerja jelas terlihat dari pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Dalam pandangan aparat pemerintah kota Tidore Kepulauan yang diwawancarai bahwa ketika menginput suatu anggaran selama masa covid-19 yang harus dikedepankan aturan covid-19, prinsip mereka bahwa fokus anggaran memang betul-betul untuk penanganan covid-19 jadi aturan yang lainnya belum diprioritaskan.

Makna Kebijakan Efisiensi Anggaran

Pandemi Virus Covid-19 berdampak signifikan terhadap laporan keuangan tahun 2020 terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penyebabnya adalah terjadi penurunan daya beli masyarakat yang melemah dan kemungkinan terjadinya inflasi cukup tinggi. Namun, disisi lain dengan adanya penurunan PAD pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran secara radikal. Pada beberapa kesempatan ditahun anggaran 2020 peneliti mencermati adanya titik-titik efisiensi itu. Misalnya dari anggaran perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas turun signifikan. Bahwa pembatasan aktivitas masyarakat dimulai dari PSBB sampai pada PPKM berlevel memberi dampak laporan keuangan yaitu terjadi efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Efisiensi bukan hanya terjadi di pos anggaran perjalanan dinas, tetapi juga konsumsi rapat, dan anggaran transportasi. Informan berharap, saat wabah selesai, dengan efisiensi tersebut, lebih banyak kegiatan ekonomi yang bisa ditambah sehingga bisa menjadi sebuah reformasi. Efisiensi anggaran, tujuannya harus lebih dari sekadar menangani pandemi, tapi bagaimana hidup lebih baik.

Makna Kebijakan Efektivitas Anggaran

Setiap tetesan anggaran pemerintah diharapkan memiliki nilai yang bermanfaat untuk masyarakat. Begitulah jika membahas efektivitas, berapa besar belanja yang telah dikeluarkan harus tepat sasaran dan tujuan akan apa yang akan dibelanjakan. Terkait efektivitas anggaran covid-19 berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) yaitu covid-19 dapat tertangani dengan baik dengan indikator jumlah yang sembuh lebih banyak dan pemulihan ekonomi akan berkembang. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengalihan anggaran ke covid-19 dikatakan efektif apabila proses penanganan covid-19 mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, yaitu anggaran *Covid-19* bukan hanya sebagai stimulus tetapi lebih dari itu mampu mengendalikan situasi selama covid-19 sehingga kembali pada kehidupan normal.

Berdasar analisis yang peneliti lakukan dengan mengacu pada laporan keuangan pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan tahun 2020, jelas terlihat bahwa anggaran belanja langsung selama pandemi Covid-19 belum berjalan dengan efektif hal ini karena banyak anggaran belanja langsung yang dialihkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 oleh Pemerintah kota Tidore Kepulauan. Dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda Pemerintah daerah mengesampingkan rencana pembangunan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Untuk penanganan Covid-19 hal inilah yang menyebabkan realisasi anggaran belanja langsung pada APBD Tahun 2020 berjalan belum efektif dengan hasilnya kurang maksimal. Semua belanja langsung memang tidak efektif karena harus dialihkan untuk penanganan covid-19 kecuali pada belanja pegawai. Belanja pegawai memang diupayakan pemerintah kota Tidore Kepulauan agar tetap berjalan efektif, hal ini karena masa pandemi

covid-19 segala sesuatu serba sulit, jadi jika belanja pegawai dipangkas, kemungkinan akan berdampak pada sisi ekonomi. Akhirnya, dapat diambil “benang merah” bahwa nilai dari belanja langsung memang diperuntukan hampir 90 % untuk penanganan covid-19, sedangkan hanya 10 % saja untuk belanja langsung. Hampir seluruh belanja langsung terkuras untuk mendanai covid-19. Secara manfaat belanja langsung tidak memberikan manfaat bagi pelaksanaan kegiatan yang harusnya menggunakan anggaran dari belanja langsung. Secara dampak anggaran, memang sangat terasa, karena banyak belanja langsung yang tidak bisa diproses untuk kepentingan pembangunan dan infrastruktur. Dengan demikian, dapat dikatakan efektifitas belanja langsung belum efektif dan tepat sasaran

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar pada kajian, peneliti menyimpulkan :

1. Laporan keuangan pemerintah kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, tidak berdampak pada masa pandemi Covid-19. Hal ini bisa ditunjukkan pada neraca tentang kewajiban pemerintah kota Tidore Kepulauan dimana Kewajiban pemerintah daerah telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAP, adapun terkait penjelasan dalam CaLK terkait kebijakan utang khusus dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 pemerintah kota Tidore Kepulauan tidak memiliki kewajiban yang harus dilunasi terkait penanganan pandemi Covid 19.
2. Ikhtisar pencapaian target keuangan tahun 2020 telah dijelaskan adanya target yang tidak tercapai dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 khususnya penerimaan PAD.
3. Belanja langsung pemerintah kota Tidore Kepulauan, hampir 90 % di *refocussing* untuk penanganan covid-19.

Implementasi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas hanya dimaknai sebagai simbol Aturan covid-19. Bahwa ekonomis, efisiensi, efektivitas dalam simbol-simbol yang dilakukan pada ruang interaksi pemerintah kota Tidore Kepulauan hanyalah aturan covid-19. Dan tidak didefinisikan pada konteks yang lebih luas. Artinya dari sisi Me interaksi simbolik pemerintah kota Tidore Kepulauan cenderung mengedepankan pemenuhan anggaran untuk kepentingan yang mendesak yaitu dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Simbolik interaksi yang diperlihatkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada ruang-ruang dimana mereka berinteraksi selalu membawa simbol aturan covid-19. Dari gaya mereka berbicara dan berdiskusi jika peneliti menanyakan tentang laporan keuangan dimasa covid-19 terkait ekonomis, efisien dan efektif, jawaban mereka hanyalah merujuk pada Undang-undang Pemerintah tentang covid-19

Saran

Peneliti memberikan beberapa saran :

1. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, cenderung tertutup ketika peneliti “mengorek” data mengenai *refocussing* anggaran covid-19, harusnya pemerintah kota Tidore Kepulauan lebih transparan. Keengganan pemerintah kota Tidore Kepulauan menjawab angket catatan atas laporan keuangan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bisa dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti berikutnya untuk mengambil judul yang sama.
2. Karena keterbatasan waktu maka diskusi, wawancara, pengisian angket Penelitian hanya pada eksekutif pemerintah kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini belum “menyentuh” pada ranah legislatif pemerintah kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya, bisa menjadikan kajian penelitian ini pada ranah legislatif / DPRD.
3. Karena keterbatasan waktu, peneliti hanya mengambil laporan keuangan tahun 2020, disarankan peneliti selanjutnya bisa menggunakan laporan keuangan dimasa covid-19, yaitu laporan keuangan tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Hanafi dan Abdul Halim. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Harahap, Sofyan S. 2016. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Kurnia. Sri. 2016. Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Value for Money pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Palembang : Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang

Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Moeleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nurhayati. 2017. *Analisis Laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu..* Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengaraian : Jurnal

Pradono, Basukiyanto. 2015. *Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah : Faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan (Studi pada SKPD provinsi Jawa Tengah)* Jurnal. Semarang : Jurnal bisnis dan ekonomi.

Saputra, Julius. 2015. *Pengaruh Value for money (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) terhadap akuntabilitas publik (studi kasus pada badan pemerintah daerah kota Palembang)*. Palembang : Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang

Subramanyam KR, Wild John. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Salemba empat

Chariri, 2020 <https://adoc.pub/analisis-data-fenomenologi.html>